

Kesejahteraan Sosial

INTEGRASI WANITA DALAM PEMBANGUNAN MELALUI KEMITRASEJAJARAN

Sali Susiana *)

Abstract

In recent years, the chance of women to take part in public sector has increased. It doesn't mean that their effort to put on a level with men had succeeded eventhough Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women has been declared by General Assembly of the United Nations in December, 18 1979. Gender in Development is the one of the women's effort to eliminate this situation. In Indonesia, the concept of Gender and Development was known as kemitrasejajaran.

PENDAHULUAN

Meningkatnya keterlibatan wanita Indonesia di luar sektor rumah tangga dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa peluang mereka untuk memasuki **sektor publik** juga semakin besar, yang ditandai dengan semakin banyaknya wanita yang menduduki posisi kunci dalam berbagai bidang, baik sosial, politik maupun ekonomi. Salah satu faktor penting yang berperan dalam hal ini adalah semakin banyaknya kesempatan yang diberikan kepada wanita untuk menempuh pendidikan tinggi. Faktor pendukung lainnya adalah terjadinya perubahan dari era industri ke era informasi dan perubahan dari manajemen ke kepemimpinan.¹⁾

Peranan wanita dalam bidang ketenagakerjaan ditunjukkan oleh tingkat partisipasi tenaga kerja wanita yang terus meningkat, dari 32,4 % pada tahun 1980, menjadi 38,8 % pada tahun 1990. Bahkan dalam kurun waktu 1980-1990, laju pertumbuhan angkatan kerja wanita lebih cepat dari angkatan kerja pria dengan perbandingan 4,4 : 3,1 persen.²⁾ BPS

* Penulis adalah calon peneliti bidang Kesejahteraan Sosial pada PPII Set-Jen DPR-RI

1) John Naisbitt & Patricia Aburdene, Megatrend 2000 : The New Directions for the 1990s, William Comp Inc New York, 1990.

2) Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita 1995.

memproyeksikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita akan meningkat hingga 40,2 % atau kurang lebih hampir sejajar dengan TPAK pria pada tahun 1998. ³⁾

Di satu sisi, fenomena di atas merupakan bukti keberhasilan kaum wanita dalam menembus sektor publik, sebagai bagian dari upayanya untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria. Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa jumlah wanita yang relatif sukses sebagai wanita karir masih sangat terbatas.

Di samping itu, di kalangan menengah ke bawah keterlibatan mereka pada sektor publik terkadang masih diwarnai unsur keterpaksaan. Artinya, mereka terdorong untuk memasuki sektor publik karena berbagai tekanan dari luar, terutama faktor ekonomi khususnya kemiskinan. Meskipun saat ini jumlah wanita yang berkesempatan menjalankan profesi sesuai dengan latar belakang pendidikannya semakin bertambah, namun sebagian besar masih mendapatkan pekerjaan secara terbatas pada posisi tertentu yang dianggap pantas diisi oleh wanita seperti pelayan toko, penerima tamu atau juru rawat, sehingga terkesan posisi tersebut diberikan sekedar untuk menghormati wanita dalam kaitan dengan hak asasi manusia dan bukan karena prestasi.

Kenyataan ini diperkuat oleh gambaran yang diberikan oleh Human Development Report 1995, dimana selama 20 tahun terakhir tingkat partisipasi wanita di negara-negara berkembang dalam pasar kerja hanya naik 4 %, dari 36 persen pada tahun 1970 menjadi 40 persen pada tahun 1990, meski jumlah mereka lebih dari separuh jumlah penduduk dunia yang saat ini -sekitar 5,7 milyar. ⁴⁾

Selain tingkat partisipasinya yang rendah, upah yang diterima pekerja wanita juga lebih kecil dari pria meski pekerjaan yang dilakukannya sama. Laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan rata-rata upah mereka 25 persen lebih rendah dibanding pria, meskipun jumlah jam kerjanya relatif lebih lama. ⁵⁾

Masalah yang dihadapi wanita di negara berkembang pada umumnya dan wanita Indonesia pada khususnya yang tergambar di atas sebenarnya tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi wanita secara keseluruhan. Data yang dimiliki oleh ILO memperlihatkan dari sekitar 1,3 milyar penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan absolut, 70 persen di antaranya adalah wanita. Meski terjadi peningkatan di bidang pendidikan, namun kondisinya masih saja timpang. Dari sekitar 900 juta penduduk buta huruf di negara berkembang, dua pertiga dari jumlah itu adalah wanita. Dan 60 persen dari 130 juta anak yang tidak memiliki

3) BPS, Proyeksi Angkatan Kerja 1988 - 2000.

4) Lihat : Human Development Report 1995

5) Laporan ILO, Kompas 3/5/96.

akses kepada pendidikan dasar adalah anak wanita. Ironisnya, selama dua dasa warsa terakhir (1970-1990), hanya setengah dari kesenjangan pendidikan antara pria dan wanita yang bisa dikejar.⁶⁾

Di Indonesia sendiri, belum seluruh penduduk wanita mengenyam bangku sekolah. Jumlah mereka yang pernah bersekolah baru mencapai 78,2 % dari seluruh penduduk wanita usia 10 tahun ke atas. Sekitar 64 % dari mereka tinggal di pedesaan. Persentase penduduk wanita usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan di setiap jenjang masih lebih rendah dibandingkan penduduk pria. Proporsi penduduk wanita yang dapat membaca dan menulis huruf Latin juga lebih rendah, baru sekitar 76,7 % jika dibandingkan dengan penduduk pria yang tercatat 88,4 %. Wanita berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara pada tahun 1990 masih berjumlah sekitar 14,6 juta (21,3 %) sementara pria sekitar 6,9 % (10,4 %).⁷⁾

Kesenjangan pendidikan antara kaum wanita dan kaum pria di atas pada akhirnya membawa banyak implikasi, terutama ketidaksetaraan posisi antara keduanya di berbagai bidang yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan, terutama yang menyangkut disparitas antara sumbangan yang diberikan kaum wanita dalam pembangunan nasional dengan imbalan yang diterima.

Melihat kondisi wanita seperti tersebut di atas, tak pelak lagi dibutuhkan suatu upaya bagi pemberdayaan kaum wanita. Tetapi, betulkah selama ini belum ada satu pun usaha yang dilakukan untuk mengentaskan wanita dari lembah keterpurukannya?

KONVENSI INTERNASIONAL

Sejatinya, telah dilakukan banyak usaha untuk mengatasi ketimpangan ini. Di tingkat internasional usaha ini diawali pada tahun 1967 ketika PBB mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, yang memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut.

Oleh karena deklarasi itu sifatnya tidak mengikat, maka Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita berdasarkan deklarasi tersebut menyusun rancangan **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita** (*Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*), yang kemudian disahkan oleh

6) Kompas, ibid.

7) Sensus Penduduk tahun 1990 dalam Repelita VI 1994/1995 - 198/1999 Program Peningkatan Peranan Wanita

Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini mengatur secara mendetail berbagai persoalan yang dihadapi wanita, mulai dari keluarga, dunia kerja sampai partisipasi pada tingkat pemerintahan dan telah diratifikasi oleh 139 negara.⁸⁾

Sebagai tindak lanjut, kemudian dibentuk jaringan emansipasi wanita internasional, yaitu ***Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)***.

Karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah RI dalam Konperensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi Wanita di Kopenhagen 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah kemudian mengeluarkan UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.⁹⁾

Dalam UU ini disebutkan, pelaksanaan ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan.

Meskipun pengakuan persamaan hak antara pria dan wanita secara resmi baru dilakukan tahun 1979, Lukman Idrisalmn mencatat bahwa kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan wanita sebenarnya telah tumbuh sejak awal tahun 1970-an dengan munculnya pendekatan ***Women in Development (WID/Wanita dalam Pembangunan)***. Pendekatan ini terfokus pada perubahan-perubahan legal dan administratif untuk menjamin wanita yang diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi.¹⁰⁾ Proyek-proyek WID ini pada umumnya merupakan aktivitas ***income-generating*** yang mengajarkan berbagai jenis ketrampilan tangan dan kegiatan home industry. Di samping itu masalah kesehatan dan pemberantasan buta huruf juga mendapat perhatian.¹¹⁾

Usaha meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan kaum wanita semakin menguat ketika pada pertengahan tahun 70-an muncul pendekatan lain yang sedikit berbeda dengan WID, yaitu ***Women and Development (WAD/Wanita dan Pembangunan)***, sebuah pendekatan yang terfokus kepada hubungan antara wanita dan proses pembangunan.

Tetapi meskipun telah dilakukan banyak usaha untuk mengurangi kesenjangan antara pria dan wanita, masih banyak sekali masalah yang harus dihadapi wanita. Salah satu yang mendasar adalah belum terlaksananya ketentuan dalam **pasal 11** konvensi tahun 1979 di atas. Dalam pasal 11 konvensi ini diatur hal-hal mengenai :

8) Lihat Lembaran Negara RI No. 29 tahun 1984

9) Lembaran Negara, ibid.

10) Lukman Idrisalmn dalam Majalah Management Pembangunan No. 14 tahun 1996

11) Lukman, ibid.

1. Hak untuk mendapat **kesempatan kerja** yang sama bagi wanita, termasuk dalam kriteria seleksi, promosi serta pelatihan.
2. Hak untuk mendapatkan **upah** yang sama untuk nilai pekerjaan yang sama antara laki-laki dengan wanita.
3. Hak untuk mendapat **tunjangan dan jaminan sosial** yang sama.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk **perlindungan fungsi reproduksi wanita**.
5. Hak untuk mendapatkan **pelayanan sosial** dimana wanita bisa mengkombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan penyediaan tempat penitipan anak di tempat kerja.
6. Mencegah terjadinya **diskriminasi** yang didasarkan pada status perkawinan, kehamilan, melahirkan tanpa ancaman kehilangan pekerjaan.

Namun demikian telaah pustaka dan studi lapangan menunjukkan :

1. Aturan bahwa wanita berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama sering dilanggar. Dalam banyak kasus pengusaha sering menggunakan **kriteria seleksi** yang berbeda untuk merekrut tenaga kerja wanita. Persyaratan seperti belum menikah atau tidak menikah selama jangka waktu tertentu juga sering ditemui. Wanita, untuk diterima bekerja selain berdasarkan persyaratan pendidikan formal, biasanya juga dievaluasi berdasarkan ketelitian, sedangkan pria berdasarkan kekuatan fisik.
2. Upah buruh bagi wanita biasanya juga lebih rendah dari buruh pria untuk nilai pekerjaan yang sama, yang sebagian disebabkan asumsi bahwa pria adalah kepala keluarga, sementara wanita yang bekerja khususnya di pabrik dan perusahaan swasta dianggap lajang dan bekerja hanya untuk mendapat **penghasilan tambahan**, meski ia sudah menikah dan memiliki anak.
3. Dampak lain dari status lajang adalah wanita tidak memperoleh tunjangan yang sama dengan pria, sehingga ia tidak akan mendapat tunjangan untuk dirinya dan anak-anaknya.
4. Dalam masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, berdasarkan studi lapangan di industri tekstil dan sepatu yang mempekerjakan banyak wanita, ditemui bahwa buruh tidak mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai, misalnya kebisingan suara mesin, zat kimia berbahaya disertai waktu kerja yang panjang yang sering dilakukan dengan posisi berdiri secara terus menerus.
5. Selain itu diskriminasi yang berkaitan dengan status perkawinan, kehamilan dan menyusui, ditemukan bahwa wanita seringkali

menyebut status dirinya sebagai lajang meskipun sebenarnya telah menikah dan memiliki anak, karena khawatir tidak akan diterima. Banyak buruh wanita yang dengan sukarela keluar jika ternyata hamil pada tahun pertama bekerja, dan harus menghadapi berbagai hambatan untuk bisa menikmati cuti dengan tunjangan selama hamil dan melahirkan.¹²⁾

Gambaran di atas sudah cukup untuk menunjukkan betapa banyak persoalan yang harus dihadapi oleh wanita di dunia pada umumnya dan wanita Indonesia pada khususnya jika mereka ingin memasuki sektor publik. Mau tidak mau hal ini akan menimbulkan persoalan, karena di satu pihak usaha untuk meningkatkan kesejahteraan wanita tak henti-hentinya dilakukan, namun di lain pihak hasil yang dicapainya belum seperti yang diharapkan.

KULTUR DAN STRUKTUR

Banyak faktor yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan fenomena ini, baik yang bersifat **struktural** maupun **kultural** karena situasi yang dihadapi wanita saat ini tidak bisa di lepaskan dari akar historis dan akar struktural yang menempatkan wanita pada posisi terbelakang, antara lain :

1. Adanya dikotomi maskulin/feminin peranan manusia sebagai akibat **determinisme biologis** yang mengakibatkan proses marginalisasi.
2. Adanya sindrom bahwa peran wanita adalah di rumah yang pada gilirannya akan melestarikan pembagian antara **fungsi produksi dan fungsi reproduksi** antara pria dan wanita.
3. Adanya konsep **beban kerja ganda (double burden)** yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama di rumah sebagai ibu rumah tangga yang menghalangi aktualisasi potensi wanita secara utuh.
4. Adanya sindrom **subordinasi** dan peran **marginal** wanita yang melestarikan peran dan fungsi wanita yang bersifat sekunder.¹³⁾

Situasi di atas diperparah lagi dengan adanya kekeliruan persepsi terhadap wanita yang mau tidak mau akan menghambat pengembangan kemajuan wanita. Menurut Dewi Motik Pramono, persepsi yang melihat wanita semata-mata dari fungsi reproduksi yang populer dengan sebutan **kodrat wanita** telah membuat wanita cenderung membatasi diri dalam setiap kegiatannya, meski sebenarnya ditunjang bakat dan kemampuan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya **birokrasi** yang belum

12) Ani Soecipto, Republika 3/7/96

13) Mansoer Fakhri, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar Yogyakarta

seungguhnya menunjang pengembangan potensi wanita dalam pembangunan nasional dan tingkat pendidikan yang belum memadai.¹⁴⁾

Bagi wanita yang hidup dalam keluarga miskin, kondisi yang harus dihadapi semakin berat karena mereka harus menghadapi *triple struggle* (perjuangan rangkap tiga), yaitu :

sebagai warga negara terbelakang; sebagai petani di daerah miskin dan; sebagai wanita di tengah masyarakat yang didominasi pria.¹⁵⁾

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep *triple role* (peran rangkap tiga) yang diajukan oleh Moser. Menurutnya, dalam rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerjaan wanita pada umumnya terdiri dari : peran reproduktif; peran produktif dan; peran pengelolaan kegiatan komunitas.¹⁶⁾

Dalam menjalankan ketiga peran ini secara implisit mereka menerima pembagian kerja seksual dan sifat subordinasi gender mereka. Adanya stereotipe gender menyebabkan pria beranggapan bahwa mereka adalah sebagai penghasil pendapatan utama. Hal ini tetap berlangsung meski mereka dalam keadaan mengganggu sekalipun. Pria tidak mempunyai batasan peran reproduktif yang jelas meskipun secara empiris mereka membantu pasangannya dalam aktivitas domestik. Pria juga terlibat dalam aktivitas komunitas, tetapi dalam hal yang berbeda.

Mengingat kondisi kultur dan struktur tersebut nyatalah bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi wanita memerlukan penyelesaian yang lebih dari sekedar peningkatan kesejahteraan wanita secara finansial. Beberapa pendekatan yang telah dilakukan seperti WID dan WAD terbukti belum cukup efektif untuk mengangkat wanita dari keterpurukan yang dialaminya, karena pendekatan demikian baru mampu menyelesaikan masalah yang tampak di permukaan saja. Hal ini terlihat misalnya dari pendekatan WID yang lebih menitikberatkan aspek ekonomi tanpa berusaha mencari sumber ketimpangan ekonomi itu sendiri. Dengan demikian yang dibutuhkan sekarang adalah suatu pendekatan yang benar-benar dapat menyentuh kepentingan wanita secara langsung dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi wanita baik secara langsung maupun tidak langsung.

GENDER AND DEVELOPMENT

Titik terang mulai nampak ketika pada tahun 1984 muncul pendekatan *Gender and Development* (GAD/Gender dan Pembangunan).

14) Dewi Motik Pramono, Suara Pembaruan 28/5/96

15) Bornstein seperti dikutip Susanti, Republika 5/8/95

16) Caroline Moser, Gender Planning in the Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs, 1993

Pendekatan ini diperkenalkan oleh University of College London dan dimodifikasi oleh berbagai Lembaga Dunia seperti FAO, ILO serta IMF dengan istilah *Gender Planning Procedure*.

Tema sentral pendekatan ini adalah hubungan sosial gender (pria dan wanita) yang mempertanyakan keabsahan peran yang telah disandang wanita dan pria dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fokus utamanya mempertanyakan mengapa wanita secara sistematis telah dipercayakan kepada peran yang lebih rendah atau lengkap dari pria. Pendekatan ini juga sangat konsens dengan konstruksi sosial dari gender dan pemberian peran tertentu, tanggung jawab dan harapan kepada wanita dan pria.¹⁷⁾

Gender sendiri berasal dari kata *gener* (Latin) yang berarti jenis atau tipe. Gender kemudian berarti jenis kelamin. Secara sederhana kata *gender* dipakai untuk pembagian struktur sosial berdasarkan jenis kelamin. Berbeda dengan *seks* yang dipakai untuk membedakan pria dan wanita secara biologis dan anatomis, gender dipakai untuk menunjukkan tanda-tanda emosi dan psikologis yang diharapkan oleh suatu budaya sesuai dengan bentuk fisik pria dan wanita. Dari sini kemudian muncul istilah *gender bias*, yaitu adanya keberpihakan poleksosbud terhadap salah satu jenis kelamin tertentu umumnya pria dan penyingkiran, atau paling tidak pelecehan terhadap jenis kelamin lainnya.¹⁸⁾

Menurut **Gayle Rubin** gender adalah konstruksi sosial dan kodifikasi perbedaan antar seks yang menunjuk pada hubungan sosial antara wanita dan pria.¹⁹⁾ Dengan demikian Gender adalah perbedaan perilaku (**behavioral differences**) antara pria dan wanita yang tersusun secara sosial (**socially constructed**), yaitu perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan melainkan diciptakan baik oleh pria dan wanita melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Dalam gender terdapat dua elemen yang sifatnya universal, yaitu :

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin.
2. Gender merupakan dasar pembagian kerja di semua masyarakat.

Sementara jika dilihat dari fungsinya, gender dapat berfungsi sebagai: miliknya bahasa; suatu ideologi; suatu sarana untuk kontrol sosial; penjaga jarak sosial; prinsip/asas terorganisir dalam masyarakat; penentu pria dan wanita; menjelaskan hubungan antara wanita dan pria; penentu hubungan sosial; penentu hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan; membentuk nilai-nilai dan sikap masyarakat.²⁰⁾

17) Lukman, ibid 18

18) Media Indonesia, 21 April 1996.

19) Lukman Idris alman, op. cit.

20) Lukman, ibid

Tampak bahwa pendekatan gender tidak hanya tertarik pada konsep-konsep dan norma-norma saja tetapi lebih difokuskan pada perilaku yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Berpijak dari sini baru akan ditemukan isu-isu yang perlu mendapat perbaikan dari semua pihak.

KEBUTUHAN STRATEGIS DAN KEBUTUHAN PRAKTIS GENDER

Untuk mengimplementasikan pendekatan gender dalam pembangunan, diperlukan pendekatan kesejahteraan yang tak bisa dipisahkan dengan pendekatan kekuasaan, karena kebutuhan praktis tak bisa dilepaskan dari kebutuhan strategis. Atau dengan kalimat lain, kebutuhan gender sebenarnya terdiri atas kebutuhan praktis dan kepentingan strategis. Kebutuhan praktis ini mengacu kepada kondisi wanita, sementara kebutuhan strategis menunjukkan kepada posisi wanita.

Dalam kaitan ini kita dapat mengambil konseptualisasi yang dibuat oleh Maxine Molyneux mengenai kepentingan wanita, kepentingan strategis gender dan kepentingan praktis gender. Dalam proses identifikasinya ketiga kepentingan tersebut perlu dibedakan sehingga berubah menjadi kebutuhan wanita, kebutuhan strategis gender dan kebutuhan praktis gender.²¹⁾

Kepentingan gender adalah suatu hal yang memungkinkan wanita (ataupun pria) dapat berkembang berdasarkan atas posisi sosial mereka melalui atribut-atribut gender. Kepentingan gender dapat bersifat strategis maupun praktis yang diturunkan melalui cara yang berbeda terhadap subyektivitas wanita.

Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang dirumuskan dari analisa subordinasi wanita terhadap pria dan dari analisa ini diidentifikasi kepentingan strategis gender untuk mencapai suatu alternatif kelembagaan masyarakat yang lebih setara dan yang lebih memuaskan daripada yang ada sekarang baik dilihat dari struktur maupun sifat hubungan antara pria dan wanita. Kebutuhan ini antar negara sangat beragam, tergantung kepada konteks budaya dan sosial politik. Molyneux mengidentifikasi kebutuhan strategis gender sebagai berikut :

- penghapusan pembagian kerja secara seksual;
- Pengurangan kewajiban atas kerja-kerja domestik dan perawatan anak;
- penyingkiran segala bentuk diskriminasi seperti hak memiliki tanah dan kekayaan serta hak untuk memperoleh kredit;
- mewujudkan kesetaraan politik;
- kebebasan memilih dan melahirkan anak; dan

21) Moser, op. cit.

- penerapan sarana-sarana yang layak untuk melawan tindak kekerasan pria.

Sedangkan kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang diformulasikan dari kondisi konkret pengalaman wanita dengan posisi gender mereka dalam pembagian kerja secara seksual dan dari sini kepentingan praktis gender untuk kelangsungan hidup manusia. Berbeda dengan kebutuhan strategis, kebutuhan ini diformulasikan secara langsung oleh wanita yang berada dalam posisi ini daripada melalui intervensi eksternal sehingga biasanya merupakan respons atas keperluan yang dianggap mendesak yang diidentifikasi wanita dalam suatu konteks tertentu. Perencanaan kebijaksanaan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender harus memperhatikan sektor domestik, aktivitas untuk memperoleh penghasilan dan juga kebutuhan perumahan dan kebutuhan dasar yang diperlukan dalam tingkat lokal.

IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Di Indonesia kesempatan wanita untuk berkiprah dalam pembangunan telah dirintis sejak awal PELITA III. Secara eksplisit kebijakan itu dituangkan melalui Tap MPR RI No. II/MPR/1978 tentang GBHN dimana dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga Huruf D Arah dan Kebijakan Pembangunan Umum Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya mencantumkan **Peranan Wanita dalam Pembangunan dan Pembinaan Bangsa** sebagai salah satu sektornya.²²⁾ Usaha untuk melibatkan wanita secara aktif dalam proses pembangunan semakin menguat dengan dikeluarkannya Inpres No.5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

Sebagaimana yang tercantum dalam GBHN 1993, sasaran peningkatan peranan wanita dalam pembangunan jangka panjang tahap II adalah meningkatnya kualitas wanita dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung bagi wanita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan perannya dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³⁾

Sementara peningkatan peranan wanita dalam Repelita VI ditekankan pada meningkatnya kemitrasejajaran pria dan wanita dalam kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi dan membantu antara lain dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijaksanaan dan pelaksanaan serta

22) Lihat Lima GBHN 1973-1978-1983-1988-1993 Arnicun Aziz, Ed.

23) REPELITA VI 1994/1995 - 1998/1999 Program Peningkatan Peranan Wanita

pemanfaatan hasil pembangunan.

Jelasnya, hubungan kemitrasejajaran yang harmonis bukanlah suatu pendekatan yang berlandaskan keinginan untuk menciptakan kompetisi yang tidak sehat atau pertentangan antara wanita dan pria. Atas dasar itu masing-masing harus memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam persamaan kedudukan, peranan, hak, kewajiban, kemampuan, kemandirian dan mental spiritual dalam kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara selaras, serasi dan seimbang.

Kembali kepada pendekatan gender di atas, dapatkah konsep kemitrasejajaran disamakan dengan konsep gender? Sebelum berusaha menjawab pertanyaan itu, perlu dilihat dahulu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN. Pada Bab IV huruf F Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam butir ke 32 disebutkan bahwa:

"... perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita."²⁴⁾

Membaca kutipan di atas nampaknya kata-kata kodrat, harkat dan martabat harus digarisbawahi, karena di sinilah letak perbedaan mendasar antara konsep gender dengan kemitrasejajaran. Secara tegas pendekatan berwawasan gender berusaha mengangkat harkat dan martabat wanita dengan melepaskannya dari segala atribut yang selama ini disandang, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi dan fungsi pengasuhan anak. Di sisi lain, konsep kemitrasejajaran justru menuntut wanita agar tetap memelihara kedua fungsi tersebut, yang terbalut rapi dalam kemasan kata-kata **kodrat, harkat dan martabat**.

Terlepas dari perbedaan tersebut, pendekatan berwawasan keemitrasejajaran mengandung tantangan tersendiri. Upaya menuju kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita bukanlah suatu usaha yang mudah, karena akses dan kontrol kaum wanita di Indonesia terhadap sumber daya strategis seperti pendidikan, kesehatan kerja, kekuasaan, pengambilan keputusan, informasi, iptek dll sampai saat ini masih terbatas.²⁵⁾

Kendala terbesar bagi implementasi berbagai konvensi dan deklarasi untuk meningkatkan peran dan kedudukan wanita sebagaimana diungkap

24) Lima GBHN 1973-1978-1983-1988-1993

25) Hasil Diskusi "Apa Sesudah Beijing" oleh Kantor Penerangan PBB/UNIC tanggal 8/3/96

di atas adalah kendala sosio-kultural dan struktural, sehingga meski berbagai upaya telah dilakukan, peningkatan peran dan kedudukan wanita belum menampakkan kemajuan yang signifikan.

Dari segi sosio-kultural, konteks masyarakat Indonesia beserta nilai-nilai budayanya, yang sebagian besar masih menempatkan wanita pada posisi subordinat mau tidak mau ikut menentukan keberhasilan perjuangan wanita untuk keluar dari lembah ketidakberdayaannya. Situasi ini masih diperkuat oleh penafsiran dari berbagai ajaran agama (terutama Islam) yang menekankan ketidaksejajaran antara pria dan wanita dan melegitimasi supremasi satu terhadap lainnya.²⁶⁾ Meskipun demikian, keragaman kultur yang ada secara tidak langsung juga telah ikut melapangkan jalan ke arah kemitrasejajaran, misalnya pola matrilineal pada masyarakat Sumatera Barat.

Sementara dari segi struktur, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada semua tingkatan masih sering mengabaikan faktor gender, misalnya dalam UU Perkawinan No.1/1974 dimana ketentuan pasal 31 dan 34 justru menguatkan pembagian kerja dan peran dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin.²⁷⁾

PENUTUP

Untuk memenuhi ketiga kebutuhan gender di atas, diperlukan pengintegrasian wanita dalam pembangunan. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi wanita, maka agar usaha tersebut membuahkan hasil yang optimal, harus diperhatikan tiga hal berikut. Pertama, terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung peningkatan peranan wanita. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran kedudukan wanita secara konsisten. Dan ketiga, peningkatan proporsi wanita dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan agar meningkatkan peranan dan fungsi supra struktur politik, meningkatkan wanita dalam pimpinan orsospol, ormas termasuk organisasi profesi dan serikat kerja serta meningkatkan partisipasi wanita dalam jabatan pimpinan dan pengambilan keputusan di lingkungan aparatur negara.

Kebijakan itu akan lebih strategis jika didukung oleh strategi berikut. Pertama, memberikan pendidikan atau penataran khusus di bidang politik, perjenjangan bagi aparatur negara, pelatihan kepemimpinan wanita, penyuluhan dan advokasi yang ditujukan untuk kemandirian wanita. Dan kedua, meningkatkan peran media massa sebagai sarana sosialisasi wawasan kemitrasejajaran di semua bidang kehidupan.

26) Lihat Didin Syafruddin dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Uloomul Qur'an No. 5 dan 6 Vol. V tahun 1994

27) Kompas 9/3/96

LITERATUR

1. Aziz, Arnicon Ed. Lima GBHN 1973-1978-1983-1988-1993, Sinar Grafika Jakarta, 1994.
2. Fakhri, Mansoer **Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial** Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996.
3. **Indikator Sosial Wanita Indonesia 1993**, BPS 1993.
4. Moser, Caroline **Gender Planning in the Third World : Meeting Practical and Strategic Gender Needs**, 1994.
5. Naisbitt, John and Patricia Aburdene **Megatrend 2000 : The New Directions for the 1990s**, William Morrow and Company Inc New York, 1990.
6. **REPELITA VI 1994/1995 - 1998/1999, Program Peningkatan Peranan Wanita**, Kantor Meneg UPW Jakarta 1995.
7. Sanderson, Stephen K **Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial**, Rajawali Press Jakarta 1991.
8. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan **Ulumul Qur'an** No.5 dan 6 Vol. V Tahun 1994.
9. **Majalah Manajemen Pembangunan** No. 14 Tahun 1996.
10. **Republika**, 5 Agustus 1995.
11. **Kompas**, 9 Maret 1996.
12. **Media Indonesia**, 21 April 1996
13. **Suara Pembaharuan**, 28 Mei 1996.
14. **Republika**, 3 Juli 1996.
15. **Kompas**, 3 Agustus 1996.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA